

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu negara, terutama pada negara berkembang atau *Less Developed Countries* (LDC) seringkali terhambat dengan keterbatasan modal. Hal tersebut tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan suatu negara dan dapat menghambat tercapainya kepentingan nasional. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan strategi perencanaan pembangunan yang matang, terarah serta berkesinambungan. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan ekonomi dan mengatasi permasalahan modal tersebut adalah dengan menarik investasi asing untuk mendanai proyek – proyek infrastruktur di Indonesia.

Dalam literatur hukum ekonomi atau hukum bisnis, investasi dapat berarti adanya peristiwa penanaman modal yang dilakukan oleh investor lokal yang disebut penanaman modal dalam negeri, investor asing yang disebut penanaman modal asing. Pengertian investasi asing menurut undang-undang No. 1 Tahun 1967 (selanjutnya disebut sebagai UU Lama) hanyalah meliputi investasi asing secara langsung yang dilakukan menurut dan berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Secara langsung (*Foreign Direct Investment*), berarti investor secara langsung menjalankan perusahaan yang

bersangkutan di Indonesia. Selanjutnya Investasi Asing berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan : “Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.¹ Sehingga modal asing atau investasi asing ini dapat digunakan untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

Dewasa ini investasi asing telah berperan sebagai komponen penting dalam perekonomian negara, khususnya di Indonesia. Terbukti bahwa investasi asing atau FDI (*Foreign Direct Investment*) masih mendominasi realisasi investasi di Indonesia, yaitu sebesar Rp 430,5 triliun dari total realisasi sebesar Rp 678,8 triliun. Artinya, sekitar 62,42% pemenuhan realisasi investasi masih berasal dari luar negeri. Sejak delapan tahun terakhir, investasi asing maupun domestik menunjukkan tren pertumbuhan. Indonesia yang masuk dalam kategori layak investasi, terkendalinya laju inflasi, dan tren ekonomi yang bertumbuh sekitar 5% menjadi kekuatan Indonesia di mata investor. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi asing paling tinggi dikucurkan ke sektor pertambangan, dengan nilai mencapai US\$ 4,37 miliar atau setara Rp 58,5 triliun, sektor suplai listrik; gas; air sebesar US\$ 4,2 miliar, sektor metal; mesin; industri elektronik sebesar US\$ 3,8 miliar, sektor *real estate; industrial real estate; office building* sebesar US\$ 2,9 miliar, sektor industri farmasi dan

¹ Margono, S, Hukum Investasi Asing Indonesia, Jakarta:CV.Novindo Pustaka Mandiri, 2008,hal 17-18.

kimia sebesar US\$ 2,6 miliar, sektor industri makanan sebesar US\$ 2 miliar, sektor transportasi; perdagangan dan telekomunikasi sebesar US\$ 1,9 miliar, sektor produksi pangan sebesar US\$ 1,4 miliar, jasa lainnya US\$ 1,4 miliar dan sektor perdagangan sebesar US\$ 1,3 miliar.²

Dalam tren investasi dunia, Indonesia menempati peringkat ke 14 sebagai negara tujuan investasi pada tahun 2014 di Asia Tenggara.³ Terjadi kenaikan dari sebelumnya dari peringkat ke 19 di tahun 2013. Selain itu, pada tahun 2014 Indonesia termasuk ke dalam lima besar negara tujuan investasi di Asia Timur dan Tenggara.⁴ Kemudian, pada tahun 2015 Indonesia merupakan penerima investasi asing tertinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya, dengan jumlah investasi USD 13,6 Juta. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama periode 2011 - 2015 investasi asing yang masuk ke Indonesia berasal dari beberapa negara yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Malaysia, Singapore, Jepang dan Korea Selatan. Kemudian, pada tahun 2014 negara asal investor di Indonesia terdiri dari Singapura, Jepang, Malaysia, Belanda, dan Inggris. Sedangkan, pada tahun 2012 negara asal investor terbesar di Indonesia adalah Singapura, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Mauritius.⁵

Berkembangnya tren investasi asing di Indonesia juga dilatar belakangi oleh meningkatnya kepentingan Indonesia untuk mengembangkan proyek infrastrukturnya demi meningkatkan perekonomian nasional. Hal ini terbukti pada

² Katadata, "Inilah 10 Sektor Dengan Investasi Asing Tertinggi 2017", URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/01/inilah-10-sektor-dengan-investasi-asing-tertinggi-2017>. Diakses Tanggal 1 Juni 2018.

³ UNCTAD, *World Investment Report 2015*. United Nations., New York and Geneva, 2015. Retrieved from: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

10 November 2014, Presiden Joko Widodo menawarkan sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia yang membutuhkan investasi pihak swasta dalam pidatonya di *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting* ke 22 yang diselenggarakan di Beijing, Tiongkok.⁶ Presiden Joko Widodo mengungkapkan keterbatasan anggaran yang dimiliki Indonesia untuk membangun infrastruktur yang telah disusun oleh pemerintah terkait target Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam periode kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menjanjikan akan membangun 24 pelabuhan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua. Termasuk pembangunan 25 bendungan, yang merupakan pengalihan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi pengairan bagi pertanian. Selain itu, terdapat rencana memperluas jaringan kereta api dan pembangunan jaringan transportasi massal di enam kota besar termasuk Jakarta, Bandung dan Surabaya. Serta pembangkit listrik, yang akan membantu pembangunan sektor industri Indonesia. Presiden Joko Widodo juga menjamin akan membantu para investor asing menyelesaikan berbagai kendala yang menjadi penghambat masuknya investasi asing selama ini.⁷

Undangan untuk berinvestasi di Indonesia tersebut kemudian disambut baik oleh Tiongkok. Dengan populasi dan kekayaan sumber daya alam yang besar, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan yang menarik bagi investasi asing di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki sumber daya manusia

⁶ Cnnindonesia.com, "Jokowi Sodorkan Ratusan Proyek Infrastruktur". URL: <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141110112428-92-10528/jokowisodorkan-ratusan-proyek-infrastruktur/>. Diakses Tanggal 1 Juni 2018.

⁷ Harefa, M. *Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. (A. Prof.Dr.Ir Wayan Rusastra, M.S, Ed.). Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). 2015. Retrieved from http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_individu/buku-individu-12.pdf

terpadat keempat di dunia dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 yaitu 261,115,456 jiwa.⁸ Kemudian, GDP Indonesia menempati peringkat ke 16 besar di dunia dengan US\$ 932,259 juta. Dengan berbagai potensi sumber daya yang tersedia, Indonesia dianggap mampu menjadi pangsa pasar baru bagi industri Tiongkok.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibarani, mengungkapkan bahwa minat investor asal Tiongkok terus menunjukkan tren peningkatan. Pada realisasi kuartal I/2016, Tiongkok berhasil membukukan nilai investasi sebesar US\$ 464,6 juta atau naik 518,6% dibandingkan kuartal IV/2015 senilai US\$ 75,1 juta. Realisasi investasi dari Tiongkok yang terdekat di bidang industri farmasi, listrik, konektivitas laut dan udara. Pada kuartal I/2016, Tiongkok berhasil menduduki peringkat ke-4 dengan nilai investasi sebesar US\$ 464,6 juta atau sekitar Rp 6,45 triliun. Nilai itu terdiri dari 339 proyek dengan 10.167 pekerja lokal.⁹ Angka tersebut meningkat sebanyak 67 persen dibandingkan nilai investasi Tiongkok di Indonesia pada tahun 2014. Dengan demikian, Tiongkok menjadi salah satu negara asal investasi terbesar di Indonesia pada tahun 2015. Hal ini juga sejalan dengan tujuan investasi Tiongkok ke luar negeri, dimana Indonesia menempati peringkat kedua.¹⁰ Peringkat pertama tujuan investasi Tiongkok di luar negeri adalah Amerika Serikat, diikuti Rusia

⁸ Worldpopulationreview, "Indonesia Population 2015". URL: <http://worldpopulationreview.com/countries/indonesiapopulation/>. Diakses Tanggal 1 Juni 2018.

⁹ Finansial, "Investasi RI: Minat Tiongkok Makin Besar, Kepala BKPM Terapkan Syarat Ini". URL: <http://finansial.bisnis.com/read/20160620/9/559539/investasi-ri-minat-Tiongkok-makin-besar-kepala-bkpm-terapkan-syarat-ini>. Diakses Tanggal 1 Juni 2018.

¹⁰ Kompas.com., "Indonesia Jadi Negara Terbesar Kedua Tujuan Investasi Tiongkok". URL: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/03/21/181500726/Indonesia.Jadi.Negara.Terbesar.Kedua.Tujuan.Investasi.Tiongkok>. Diakses Tanggal 1 Juni 2018.

diperingkat ketiga dan India diperingkat keempat. Berdasarkan data Financial Times, Franky menyebut bahwa investasi Tiongkok ke luar negeri antara 2010 hingga 2015 mencapai US\$ 219,897 miliar. Maka demikian, 11 persen investasi Tiongkok ditujukan ke Indonesia.¹¹

Berdasarkan pada fakta-fakta diatas, maka sangatlah penting untuk diadakan sebuah penelitian untuk melihat seperti apa analisa faktor pendorong peningkatan investasi asing Tiongkok ke Indonesia pada era pemerintahan presiden Joko Widodo. Melalui penelitian ini, nantinya akan menguraikan faktor peningkatan investasi asing Tiongkok ke Indonesia sehingga pembaca dapat memahai tentang faktor pendorong meningkatnya investasi Tiongkok dan pentingnya investasi dalam pembangunan suatu negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian di skripsi ini akan dirumuskan dalam kalimat sebagai berikut “Mengapa pemerintahan Presiden Joko Widodo mendorong peningkatan investasi Tiongkok ke Indonesia?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong yang mempengaruhi peningkatan investasi Tiongkok ke Indonesia pada era Pemerintahan Joko Widodo.

¹¹ Ibid

D. Kerangka Teori

Politik Luar Negeri

Politik luar negeri dalam Hubungan Internasional merupakan studi yang kompleks, karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, tapi juga melibatkan aspek – aspek internal suatu negara.¹² Sebagai suatu sistem, Menurut **James N. Rosenau** yaitu:

“Rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai suatu input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.”¹³

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap dan arah serta sasaran untuk mempertahankan,

¹² James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson.. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, 1976, hal. 15.

¹³ James N. Rosenau, *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press, 1980, hal.171,173

mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional.¹⁴

Politik luar negeri merupakan sistem tindakan-tindakan dari suatu pemerintah terhadap pemerintahan lainnya. Politik luar negeri adalah sekumpulan kebijakan yang berperan dan berpengaruh, dalam hubungan suatu negara (pemerintah) dengan negara (pemerintahan) lainnya, dengan mempertimbangkan juga tanggapan (respon terhadap kejadian dan masalah dilingkungan dunia internasional). Dengan kata lain politik luar negeri merupakan sintesa dari pengejawantahan tujuan dan kemampuan (kapabilitas) nasional.¹⁵

Politik luar negeri merupakan suatu strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dicapai melalui politik luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta power yang dimiliki untuk menjangkaunya. Tujuan dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah (*revisionist policy*) atau mempertahankan (*status quo policy*) ihwal kenegaraan tertentu dilingkungan internasional.¹⁶

¹⁴ A.A, Perwita., dan Y. M., Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005. hal. 47.

¹⁵ T. A., Couloumbis., & J. H. Wolfe., *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*. (M. Marbun, Trans.) Abardin, Bandung. hal 89-90.

¹⁶ Jack C. Plano, Roy Olton, *The International Dictionary*, terj. Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd. England, 1982, hal. 5-6.

Politik luar negeri suatu negara senantiasa didalamnya mengandung dua unsur saling berinteraksi, yaitu keajegan (tetap) dan perubahan. Unsur keajegan biasanya meliputi nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat di negara tersebut serta prinsip - prinsip dasar bernegara yang disepakati, sementara unsur perubahan lebih menyangkut pada persoalan strategi, prioritas, dan cara - cara memperjuangkan kepentingan nasionalnya¹⁷.

Sebagaimana halnya kepentingan nasional yang dapat mengalami perubahan, demikian pula politik luar negeri suatu negara. Namun, ada beberapa faktor determinan adanya indicator yang dapat digunakan untuk memahami perilaku politik luar negeri. Dalam hal ini, William D. Coplin mengidentifikasi ada empat determinan politik luar negeri.

Pertama, adalah konteks internasional. Artinya, situasi politik internasional yang sedang terjadi pada waktu tertentu dapat mempengaruhi bagaimana negara itu akan berperilaku. **Kedua**, adalah perilaku para pengambil keputusan. Perilaku pemerintah yang dipengaruhi persepsi, pengalaman, pengetahuan dan kepentingan individu - individu dalam pemerintahannya menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan luar negeri. **Ketiga** adalah kondisi ekonomi dan militer. Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara dapat mempengaruhi negara tersebut dalam interaksinya dengan negara lain. Dan **keempat**, yang mempengaruhi politik luar negeri adalah politik dalam

¹⁷ Ganewati Wuryandari; Pusat Penelitian Politik (Indonesia), Politik Luar Negeri Indonesia ditengah Pusaran Politik Domestik, Jakarta : P2P-LIPI- 2008, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008. hal. 17

negeri. Situasi politik dalam negeri akan memberikan pengaruh dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri.¹⁸

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.¹⁹ Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.²⁰ Lebih lanjut, menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (*internal life*) dan kebutuhan eksternal (*external needs*) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa.²¹

Langkah pertama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup:

- a. menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik;
- b. menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri;
- c. menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki;

¹⁸ *Ibid.* hal 17-18.

¹⁹ James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, 1976, hal. 27.

²⁰ *Ibid*, hal. 32.

²¹ *Ibid*, hal. 15.

- d. mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variable tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan tindakan yang diperlukan;
- f. secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.²²

Sementara menurut Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.²³

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara- negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral.²⁴

Plano berpendapat bahwa setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan

²² Jack C. Plano dan Roy Olton. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, 1999. hal. 5.

²³ K.J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta, 1992. hal. 21

²⁴ A.A, Perwita., dan Y. M., Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005. hal 49

mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta *power* yang dimiliki untuk menjangkaunya.²⁵

Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.²⁶

Tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pada dasarnya tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan.²⁷

K.J. Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

1. Nilai (*values*) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek (*short-term*), jangka menengah (*middleterm*), dan jangka panjang (*long-term*).
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.²⁸

²⁵ Plano dalam A.A, Perwita., dan Y. M., Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005. hal 51.

²⁶ Mochtar Mas'ood. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1994. hal. 184.

²⁷ James N. Rosenau. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press, 1969, hal. 167.

²⁸ Bruce Russett dan Harvey Starr. *World Politics: The Menu for Choice*. 2nd ed. New York: W.H. Freeman and Co., 1988, hal. 190-193.

Kebijakan luar negeri mempunyai tiga konsep untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadian dan situasi diluar negaranya, yaitu :

1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientation*). Politik luar negeri sebagai sekumpulan orientasi merupakan pedoman bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi kondisi - kondisi eksternal yang menuntut pembuatan keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut. Orientasi ini terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai - nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah, dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional.

2. Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitments to and a plan for action*). Dalam hal ini kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitmen konkret yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri. Rencana tindakan ini termasuk tujuan yang spesifik serta alat atau cara untuk mencapainya yang dianggap cukup memadai untuk menjawab peluang atau tantangan dari luar negeri.

3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*). Pada tingkat ini kebijakan luar negeri berada dalam tingkat yang lebih empiris, yaitu berupa langkah - langkah nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi dilingkungan eksternal.

Langkah-langkah tersebut dilakukan berdasarkan orientasi umum yang dianut serta dikembangkan berdasarkan komitmen dan sasaran yang lebih spesifik.²⁹

E. Hipotesis / Argumen Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah diatas, maka mendorong penulis untuk merumuskan hipotesa bahwa faktor pendorong peningkatan investasi Tiongkok di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo menurut teori Politik Luar Negeri adalah :

1. Faktor Internal :

- a. Kebutuhan realisasi infrastruktur sebagai program pemerintahan Presiden Joko Widodo.
- b. Sejalannya Maritime Silk Road dengan Poros Maritim Dunia.

2. Faktor Eksternal :

- a. Munculnya Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi baru.
- b. Munculnya Gagasan Maritime Silk Road oleh Tiongkok dan AIIB.

F. Metode Penelitian

G.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan bekerja dengan informasi-informasi data dan menganalisa tidak menggunakan data statistik.

²⁹ James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. NewYork: The Free Press, hal. 16-17.

G.2. Sumber Data

Apabila ditinjau dari asal sumbernya, maka data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti dari sumber yang tidak langsung, yaitu dari berbagai buku, jurnal, dokumen, internet, dan artikel kliping yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dengan begitu peneliti menyalin data dari beberapa artikel, jurnal, dokumen, buku, maupun internet yang berkaitan dengan investasi Tiongkok ke Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

G.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu berusaha untuk mencari data melalui pengamatan tidak langsung dengan membaca buku, laporan, jurnal, surat kabar, website, dan artikel, untuk memperoleh pengertian dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

G.4. Teknik Analisa Data

Penelitian ini dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif, yang berarti data dan fakta yang diperoleh dan berdasarkan teori akan dianalisa secara sistematis, sehingga dapat memperlihatkan hubungan atau korelasi antara fakta yang satu dengan fakta yang lain.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini ditulis secara sistematis berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi:

- a. Latar belakang masalah
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan penelitian
- d. Kerangka Teori
- e. Hipotesis / Argumen Penelitian
- f. Metode penelitian
- g. Sistematika penulisan

Bab II : Gambaran Umum Investasi Asing Tiongkok di Indonesia

- a. Sejarah Hubungan dan Investasi Asing Tiongkok di Indonesia
- b. Peningkatan Investasi Asing Tiongkok di Indonesia Pada Era Pemerintahan Joko Widodo
- c. Daftar Investasi Tiongkok di Indonesia

Bab III : Faktor Pendorong Peningkatan Investasi Tiongkok ke Indonesia Pada Era Pemerintahan Joko Widodo

Bab IV : Kesimpulan

